

**PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, AKUNTABILITAS, TEKANAN
EKSTERNAL DAN KOMITMEN PIMPINAN TERHADAP PENERAPAN
TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN
(Studi Empiris Pada SKPD Kota Pekanbaru)**

Oleh:

Rossa Amelia AS

Pembimbing : Restu Agusti dan Riska Natariasari

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : ocameliaas@gmail.com

*The Influence of Internal Control, Accountability, External Pressure and Leader
Commitment on Transparency of Financial Reporting (Study on Pekanbaru
Government)*

ABSTRACT

The purpose of this research was to examine the influence of internal control, accountability, external pressure and leader commitment on transparency of financial reporting. This research is expected to help the government in order to improve the transparency of financial reporting increasingly better in the future. The sample used in this research are the echelon IV and accounting department in Pekanbaru City Government. Data was collected through questionnaire survey method. The data was collected by using 96 questionnaires that spread to 32 SKPD (regional work units). Data were analyzed by using multiple regression (multiple regression) and moderate regression (Moderate Regression Analysis-MRA) with the help of a computer program SPSS version 17.0. The results showed that internal control, accountability, external pressure and leader commitment had significant influence on transparency of financial reporting.

Keywords: transparency, accountability, pressure, and commitment.

PENDAHULUAN

Era otonomi daerah di Indonesia mulai diberlakukan pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah diberlakukannya UU ini, terjadi perubahan yang besar terhadap struktur dan tata laksana pemerintahan pada tiap-tiap daerah di Indonesia. Namun, UU otonomi daerah ini mendapatkan banyak kritikan dan masukan untuk lebih

disempurnakan lagi. Dengan terjadinya *judicial review* maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diubah dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut

menjelaskan konsep otonomi daerah, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Semenjak perubahan itu, perkembangan otonomi daerah di tiap provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat.

Untuk mewujudkan tata kelola yang baik, salah satu hal terpenting yaitu dengan melakukan reformasi dalam laporan keuangan. Pemerintah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang relevan secara jujur dan terbuka, untuk kemudian disampaikan secara tepat waktu dan tentu saja disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan tersebut harus melalui proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir dan sebelumnya akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal yang independen dan profesional. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi keuangan sesungguhnya adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Sukhemi, 2011).

Menurut Mardiasmo dalam buku *Pengelolaan Keuangan Daerah* (2012:19) salah satu karakteristik *good governance* yang digunakan

dalam akuntansi sektor publik yang dikeluarkan oleh *United Nation Development Program* (UNDP) yaitu adanya transparansi. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Hal ini untuk memenuhi hak dasar masyarakat (publik) terhadap pemerintah yaitu hak untuk mengetahui (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).

Perhatian terhadap isu transparansi keuangan publik di Indonesia semakin meningkat seiring dengan semakin seringnya media massa memuat berita mengenai hal tersebut. Hal ini terutama disebabkan oleh dua faktor berikut ini, yaitu: 1) Krisis ekonomi dan turbulen fiskal telah memberi kontribusi terhadap erosi substansial kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara, dan 2) Desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, telah menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Aliyah, 2012).

Pemerintah daerah tidak menutup mata akan pentingnya transparansi dalam tata kelola keuangan daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Daerah terkait transparansi dan partisipasi masyarakat sebelum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik terbit. Pemerintah sangat

menyadari dampak negatif yang akan ditimbulkan jika tidak adanya transparansi publik ini, yaitu dapat menimbulkan distorsi dalam alokasi sumber daya, memunculkan ketidakadilan bagi masyarakat, menyuburkan praktik-praktik korupsi, serta penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, khususnya di lingkungan organisasi sektor publik (Ridha, 2012).

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Menurut PP No. 60 Tahun 2008 ini, salah satu komponen dalam lingkungan pengendalian yang wajib diciptakan dan dipelihara sehingga menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern adalah melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif tersebut diantaranya sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, dan memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, terutama terhadap perwujudan transparansi laporan keuangan daerah. Terwujudnya transparansi laporan keuangan daerah akan menjadi landasan awal bagi tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan segala pertanggungjawaban

keuangan yang berasal dari dana masyarakat akan berjalan lancar seiring kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan negara.

Selanjutnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam hal pengendalian, dapat dilihat dari seberapa besar SKPD mampu melaksanakan elemen-elemen manajemen keuangan daerah yang diperlukan meliputi akuntabilitas. Dalam rangka menciptakan *good governance* dengan akuntabilitas publik yang baik, maka laporan keuangan daerah yang dihasilkan tersebut harus diupayakan untuk dapat secara sederhana dianalisis keterukurannya (*accountable*) (Adha, 2014).

Simbolon (2006) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas memungkinkan masyarakat untuk mengetahui segala aktivitas dan kegiatan pemerintah. *Concepts Statement* No.1 menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat membantu pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik dengan membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, membantu tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait

masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta membantu dalam mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas.

Scott yang dikutip Mulyana (2006) menjelaskan bahwa kelanggengan suatu organisasi ditentukan oleh kemampuan untuk menciptakan informasi yang terbuka, seimbang, dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Untuk dapat mewujudkan transparansi pengelolaan pemerintah daerah, bukan hanya peran pihak internal saja yang dibutuhkan. Pihak eksternal juga memiliki kontribusi dalam mewujudkan transparansi. Pada era reformasi seperti sekarang ini, pihak eksternal seperti Partai Politik (Parpol), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Institusi Bisnis, dan media publik menjadi pusat dari interaksi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Keterlibatan LSM di dalam kegiatan pemerintah daerah sudah diinisiasi sejak tahun 1990-an, utamanya setelah jatuhnya masa pemerintahan Orde Baru. Orde Reformasi dianggap telah membuka katup demokrasi sehingga membuka ruang berbagai aktor pembangunan, termasuk kalangan LSM yang pada masa sebelumnya mendapat intimidasi dan represi yang keras dari pihak

pemerintah. Pada masa *rescue*, beberapa program pemerintah pusat yang sebagian besar dananya berasal dari luar negeri, mensyaratkan adanya keterlibatan LSM dalam pelaksanaannya. Seiring dengan perubahan paradigma yang menuntut adanya keterlibatan luas dari seluruh aktor pembangunan dan pengurangan peran pemerintah, maka LSM-LSM mulai diminta untuk terlibat memberikan masukan dalam perumusan kebijakan publik (Abidin dan Rukmini, 2004).

Adanya lingkungan demokrasi yang makin terbuka dan transparan, telah membuka ruang bagi gerakan sipil dalam proses transformasi sosial di berbagai bidang kehidupan publik. Keberadaan LSM sebagai satu elemen *civil society* strategis dan mampu menjadi medium penghubung sekaligus penengah (*intermediary*) dari berbagai kepentingan yang belum terwakili, baik oleh partai politik maupun lewat ormas (Fahrudin, 2003).

Di dalam suatu organisasi pemerintahan diperlukan sumber daya manusia yang dapat menjalankan roda pemerintahan. Sumber daya manusia ini yang akan menjadi penggerak kelancaran jalannya kegiatan usaha. Kinerja organisasi publik harus dilihat secara luas dengan mengidentifikasi keberhasilan organisasi tersebut dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan melakukan perbaikan-perbaikan maupun peningkatan pelayanan kepada masyarakat karena kinerja pemerintah telah mengarah ke *good governance*. Salah satu caranya yaitu dengan menciptakan transparansi laporan keuangan setiap SKPD

kepada publik. Komitmen pimpinan dalam organisasi atau pemerintahan menentukan suatu daya dari seseorang dalam mengidentifikasi keterlibatannya dalam suatu bidang organisasi, oleh karena itu komitmen akan menimbulkan rasa ikut memiliki bagi pekerjaan terhadap organisasi. Dengan adanya komitmen, organisasi dapat berkembang searah dan seiring sejalan dalam usaha mewujudkan program organisasi, dengan kata lain komitmen pimpinan dapat mempengaruhi motivasi individu untuk menentukan suatu hal.

Untuk menerapkan transparansi pengelolaan keuangan juga dibutuhkan komitmen yang tinggi oleh pegawai pemerintah daerah. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku akan dapat terwujud bila diikuti oleh komitmen yang tinggi dari para pimpinan organisasi. Sistem manajemen yang baik, yaitu apabila SKPD memiliki staf yang handal dan kompeten di bidangnya masing-masing, akan berdampak pada tercapainya transparansi pelaporan keuangan sehingga standar profesionalisme pada SKPD dapat terpenuhi.

Keterbukaan informasi merupakan fenomena global yang telah dikenal hampir di seluruh negara. Termasuk di Indonesia. Keterbukaan informasi publik menjadi isu strategis dalam upaya menggapai *good governance* yang merupakan cita-cita bersama masyarakat Indonesia. Semangat mendorong terwujudnya *good governance* melalui keterbukaan informasi publik, disusul dengan lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, yang mengatur secara khusus tentang Keterbukaan

Informasi Publik (KIP). Dalam konteks anggaran, lahirnya UU KIP menjadi angin segar bagi keterbukaan pengelolaan anggaran. Karena UU tersebut menjamin dan memandu masyarakat untuk meminta informasi yang terkait dengan pengelolaan anggaran negara dari mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah (APBN/APBD).

Namun, fakta di lapangan jauh berbeda dengan semangat *good governance* melalui keterbukaan informasi khususnya pengelolaan anggaran yang digemborkan pemerintah. Lahirnya UU KIP enam tahun silam belum berdampak besar terhadap keterbukaan informasi di Indonesia. Rendahnya tingkat masyarakat “melek” anggaran (*budgetliteracy*), akibat dipengaruhi oleh rezim tertutup selama ini. Bahkan hingga saat ini masih banyak aparatur pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah yang menganggap informasi anggaran sebagai “rahasia negara” yang tidak boleh disampaikan kepada masyarakat luas. Hal itu mengasumsikan, pengelolaan anggaran adalah urusan pemerintah, sedangkan masyarakat dianggap tidak perlu mengetahui dan memahaminya.

Saat ini masih belum begitu banyak penelitian empiris yang dilakukan di Indonesia mengenai penerapan transparansi pelaporan keuangan di pemerintah daerah. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan, khususnya di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ridha (2012) yang melakukan penelitian tentang pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, dan komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada pemerintah daerah di wilayah provinsi D.I. Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan eksternal dan komitmen manajemen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Sihaloho (2013) dan Asmidawati (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Sejalan dengan hasil penelitian Ridha (2012), hasil penelitian Sihaloho (2013) dan Asmidawati (2013) juga menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Maka, peneliti tidak meneliti kembali variabel ketidakpastian lingkungan.

Peneliti juga menambah 2 (dua) variabel independen lain dalam penelitiannya, yaitu melihat bagaimana pengendalian internal dan akuntabilitas berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan khususnya di pemerintahan daerah. Karena pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya kepada banyak pihak yang terkait.

Pertanggungjawaban ini dituangkan melalui laporan keuangan yang tidak hanya dapat diperoleh oleh DPRD tetapi juga oleh publik, dalam hal ini yaitu masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pihak lain yang membutuhkan informasi. Informasi keuangan seharusnya dapat diperoleh dengan mudah melalui internet, surat kabar, stasiun televisi, dan media lainnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah terdapat pengaruh pengendalian internal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan? 2) Apakah terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan? 3) Apakah terdapat pengaruh tekanan eksternal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan? 4) Apakah terdapat pengaruh komitmen pimpinan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk menguji seberapa besar pengaruh pengendalian internal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. 2) Untuk menguji seberapa besar pengaruh akuntabilitas terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. 3) Untuk menguji seberapa besar pengaruh tekanan eksternal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. 4) Untuk menguji seberapa besar pengaruh komitmen pimpinan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

TELAAH PUSTAKA

**Transparansi Pelaporan
Keuangan**

Perlu diketahui bahwa laporan keuangan dan pelaporan keuangan memiliki pengertian yang berbeda. Laporan keuangan (*financial statements*) adalah laporan yang berisi informasi keuangan sebuah organisasi. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan hasil proses akuntansi yang dimaksudkan sebagai sarana mengkomunikasikan informasi keuangan terutama kepada pihak eksternal. Menurut Martono dan Agus (2010:51) laporan keuangan merupakan ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Menurut PSAK No.1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Menurut Fahmi (2012:2) pengertian laporan keuangan yaitu merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan ini dibuat oleh pihak manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya. Laporan keuangan yang lengkap terdiri atas komponen-komponen berikut ini: (1) Neraca; (2) Laporan laba rugi; (3) Laporan ekuitas; (4) Laporan arus kas; dan (5) Catatan atas laporan keuangan. Pemerintah daerah dianjurkan untuk menyajikan laporan keuangan yang menjelaskan karakteristik utama yang mempengaruhi kinerja keuangan, posisi keuangan, dan kondisi ketidakpastian (IAI, 2007).

Pengendalian Internal

Secara umum, pengendalian internal merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Definisi pengendalian internal yang dikemukakan oleh banyak penulis pada umumnya bersumber dari definisi yang dibuat oleh COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission*) sebagai suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. Pada tahun 1992, COSO yang didirikan dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut, telah menerbitkan *Internal Control Framework* yang didalamnya disusun definisi umum untuk pengendalian internal, standar, dan kriteria pengendalian internal yang dapat digunakan untuk menilai sistem pengendalian mereka.

Akuntabilitas

Pengertian Akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2005:20) adalah sebagai berikut: "Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut."

Mahsun (2006) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik terdiri

atas dua macam, yaitu (1) akuntabilitas vertikal dan (2) akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Tekanan Eksternal

Kekuatan koersif adalah tekanan eksternal yang diberikan oleh pemerintah, peraturan, atau lembaga lain untuk mengadopsi struktur atau sistem (Ashworth, 2009). Kekuatan koersif ini juga memiliki arti sebagai kemampuan untuk menghukum atau memaksa seseorang melakukan sesuatu yang mungkin tidak ingin ia lakukan (Jackman, 2005). Adanya peraturan ditujukan untuk mengatur praktik yang ada agar menjadi lebih baik. Di sisi lain, kekuatan koersif dari suatu peraturan dapat menyebabkan adanya kecenderungan organisasi untuk memperoleh atau memperbaiki legitimasi (*legitimate coercion*) (Scott, 1987). Sehingga hanya menekankan aspek-aspek positif (Hess, 2007) agar organisasi terlihat baik oleh pihak-pihak diluar organisasi. Perubahan organisasi yang didasari kekuatan koersif akan menyebabkan organisasi lebih mempertimbangkan pengaruh politik daripada teknis (Ashworth, 2009). Perubahan organisasi yang lebih dipengaruhi politik akan mengakibatkan praktik-praktik yang

terjadi dalam organisasi, khususnya terkait penerapan transparansi pelaporan keuangan akan hanya bersifat formalitas yang ditujukan untuk memperoleh legitimasi.

Komitmen Pimpinan

Komitmen adalah sebagai perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam organisasi atau kelompok tertentu (Aranya & Ferris, 1984 dalam Pasaribu, 2009).

Robbins dan Judge (2007) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Sedangkan Mathis dan Jackson mendefinisikan komitmen organisasional sebagai derajat dimana karyawan percaya dan mau menerima tujuan-tujuan organisasi dan akan tetap tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasinya.

Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan

COSO menjelaskan bahwa pengendalian internal adalah proses, karena hal tersebut menembus kegiatan operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari kegiatan manajemen dasar. Pengendalian internal hanya dapat menyediakan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak. Hal ini menegaskan bahwa sebaik apapun pengendalian internal itu dirancang dan dioperasikan, hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai, tidak dapat sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan pengendalian internal meskipun telah

dirancang dan disusun sedemikian rupa dengan sebaik-baiknya. Bahkan bagaimanapun baiknya pengendalian internal yang ideal dirancang, namun keberhasilannya tergantung pada kompetisi dan kendala dari pada pelaksanaannya yang tidak terlepas dari berbagai keterbatasan.

Indra Bastian (2006) mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi/dinas, dan segenap personel) yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yang terdiri atas keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, dan peraturan yang berlaku serta efektivitas dan efisiensi operasi.

SKPD sebagai level pelaksana pemerintah daerah mengemban tugas untuk dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa tujuan organisasi yang terdiri atas keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, dan peraturan yang berlaku serta efektivitas dan efisiensi operasi dapat tercapai. Dalam menjalankan proses pengendalian di dalam tubuh pemerintahan, pemerintah daerah diharapkan mampu terbuka dan transparan dalam melakukan setiap kewajibannya.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan

Akuntabilitas mengandung arti pertanggungjawaban baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang dipilih atas pilihan-pilihan dan tindakan-tindakannya (Mulyana, 2006). Akuntabilitas yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan

perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing (Toha, 2007).

Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good corporate governance* berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi.

Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas adalah bahwa publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan. Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi mencakup juga praktek-praktek kemudahan si pemberi mandat mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan. Dengan demikian, akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan penting dan dalam suasana yang transparan dan demokrasi serta kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Dengan adanya akuntabilitas yang tinggi diyakini memberikan kepercayaan yang lebih dari publik sehingga harapan masyarakat akan adanya keterbukaan dari pemerintah dapat terwujud.

Pengaruh Tekanan Eksternal terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan

Transparansi pelaporan keuangan mengharuskan organisasi untuk menyajikan laporan keuangan yang bebas dari salah material dan informasi yang bias kepada pihak

luar. Hal tersebut sesuai dengan konsep keterandalan (*reliability*) dimana informasi dalam laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi (PP No. 24/2005, Lampiran II: Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan No.35).

Tekanan eksternal merupakan tekanan yang berasal dari legislatif, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Partai Politik, dan media massa, yang kemudian menjadi pendorong untuk diterapkannya transparansi pelaporan keuangan pada pemerintahan daerah. Tekanan maupun paksaan dari pihak luar mempunyai peranan yang penting terhadap transparansi kepada publik, dimana peningkatan tekanan eksternal yang terjadi akan seiring dengan peningkatan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Peraturan dan perundang-undangan merupakan indikator adanya tekanan eksternal dalam bentuk koersif untuk terciptanya transparansi pelaporan keuangan. Sehingga dengan adanya peraturan dan perundang-undangan mengakibatkan penerapan transparansi pelaporan keuangan relatif sama antara SKPD yang satu dengan yang lain. Berdasarkan teori dan uraian di atas, dapat diduga bahwa penerapan transparansi pelaporan keuangan dipengaruhi oleh Tekanan Eksternal.

Pengaruh Komitmen Pimpinan terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan

Kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting serta

bagaimana caranya seseorang memimpin hingga dapat membawa kelompok kerja kearah keberhasilan yang maksimal. Young (dalam Kartono, 2003) mendefinisikan kepemimpinan sebagai bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus. Dalam hal ini pemimpin berperan sebagai perencana (*planner*), pelayan (*steward*), dan guru (*teacher*) dengan cara mengarahkan dan mengembangkan bawahan secara terus menerus untuk meningkatkan kapasitasnya dalam bekerja agar tercipta kinerja yang tinggi.

Sebagai pemegang otoritas tertinggi, pemimpin bukan sekedar dapat mempengaruhi pemanfaatan semua sumber daya yang tersedia untuk implementasi kebijakan, tapi jauh melampaui itu juga mempunyai *power* yang dapat digunakan untuk memaksa sumber daya yang lain.

METODE PENELITIAN

Populasi penelitian adalah serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai SKPD di Pemerintahan Kota Pekanbaru. Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah seluruh Eselon IV dan bagian akuntansi di SKPD Kota Pekanbaru. Adapun teknik pengambilan sampel, dengan menggunakan teknik *purposive*

sampling. Alasan menggunakan teknik ini karena pengambilan sampel yang berdasarkan kriteria tertentu.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengisian angket atau kuesioner dan studi pustaka.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan perangkat lunak *SPSS 17.0*. Adapun pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas data, uji asumsi klasik (uji multikolinieritas, autokorelasi, dan heterokedastisitas), uji hipotesis, dan koefisien determinasi.

Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel transparansi pelaporan keuangan diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh M. Arsyadi Ridha dan Hardo Basuki (2012). Variabel pengendalian internal menggunakan instrumen yang dikembangkan Fitri Zalni (2013). Variabel akuntabilitas diukur dengan menggunakan instrumen yang dibuat oleh Liper Siregar (2011). Variabel tekanan eksternal diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan M. Arsyadi Ridha dan Hardo Basuki (2012). Sedangkan variabel Komitmen pimpinan ini diukur dengan instrumen yang dikembangkan M. Arsyadi Ridha dan Hardo Basuki (2012).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden

Kuesioner disebar pada 32 SKPD yang berada Di Pemerintahan Kota Pekanbaru. Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 96 responden. Tingkat pengembalian kuesioner mencapai 96 kuesioner kembali atau 100% dari 96 kuesioner yang telah disebar. Dari kuesioner yang dikembalikan, tidak terdapat kuesioner yang tidak dapat digunakan.

Hasil Uji Validitas

Dilihat dari uji validitas data didapatkan bahwa nilai r hitung dari item pernyataan untuk semua variabel lebih besar dari r tabel (r hitung $>$ r tabel). Hal tersebut menunjukkan bahwa semua item pernyataan untuk variabel pengendalian internal, akuntabilitas, tekanan eksternal, komitmen pimpinan dan transparansi pelaporan keuangan adalah valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Didapatkan hasil bahwa besarnya *Cronbach Alpha* pada seluruh variabel baik variabel pengendalian internal, akuntabilitas, tekanan eksternal, komitmen pimpinan dan transparansi pelaporan keuangan lebih besar dari 0,60 sehingga dikatakan *reliable*.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Dari hasil perhitungan model regresi memenuhi asumsi normalitas, bebas dari multikolinearitas, bebas dari autokorelasi, dan tidak terjadi heterokedastisitas.

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama (H_1)

Diketahui nilai t_{tabel} 1,986 pada tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan uji regresi, menghasilkan nilai t_{hitung} variabel

pengendalian internal sebesar 3,668 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dengan demikian, $t_{hitung} 3,668 > t_{tabel} 1,986$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Jadi dapat dikatakan H_0 ditolak dan H_{a1} diterima.

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua (H_2)

Diketahui nilai $t_{tabel} 1,986$ pada tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan uji regresi, menghasilkan nilai t_{hitung} variabel akuntabilitas sebesar -1,992 dengan nilai signifikansi sebesar 0,049. Dengan demikian, $t_{hitung} -1,992 < t_{tabel} 1,986$ dengan signifikansi $0,049 < 0,05$. Jadi dapat dikatakan H_0 ditolak dan H_{a2} diterima.

Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga (H_3)

Diketahui nilai $t_{tabel} 1,986$ pada tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan uji regresi, menghasilkan nilai t_{hitung} variabel tekanan eksternal sebesar 2,909 dengan nilai signifikansi sebesar 0,005. Dengan demikian, $t_{hitung} 2,909 > t_{tabel} 1,986$ dengan signifikansi $0,005 < 0,05$. Jadi dapat dikatakan H_0 ditolak dan H_{a3} diterima.

Hasil Pengujian Hipotesis Keempat (H_4)

Diketahui nilai $t_{tabel} 1,986$ pada tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan uji regresi, menghasilkan nilai t_{hitung} variabel komitmen pimpinan sebesar -2,911 dengan nilai signifikansi sebesar 0,005. Dengan demikian, $t_{hitung} -2,911 < t_{tabel} 1,986$ dengan signifikansi $0,005 < 0,05$. Jadi dapat dikatakan H_0 ditolak dan H_{a4} diterima.

Nilai koefisien determinasi sebesar 0.211. Hal ini menunjukkan bahwa Pengendalian Internal, Akuntabilitas, Tekanan Eksternal, dan Komitmen Pimpinan hanya dapat menjelaskan variabel Transparansi Pelaporan Keuangan sebesar 21,1%. Sedangkan sisanya 78,9% dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak teramati dalam model penelitian ini.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil evaluasi model penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada SKPD Provinsi Riau. Untuk mencapai sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan, SKPD Kota Pekanbaru sebagai pemerintah daerah telah menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, telah dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada SKPD Provinsi Riau. Pembuatan laporan keuangan adalah

suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*opennes*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Pelaksanaan yang telah sesuai dengan UU yang berlaku akan menjadikan laporan keuangan akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan kemudian transparansi pengelolaan keuangan juga akan semakin baik.

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa tekanan eksternal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada SKPD Provinsi Riau. Tuntutan dari pihak luar kepada pemerintah untuk dapat memberikan informasi secara terbuka mempunyai peranan yang penting terhadap transparansi pelaporan keuangan, di mana semakin kuat tekanan dari kalangan dan lembaga diluar pemerintahan yang ditujukan kepada pemerintah daerah, akan memicu peningkatan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa komitmen pimpinan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada SKPD Provinsi Riau. Kepatuhan atas hukum dan peraturan akan terwujud bila diikuti oleh komitmen pimpinan yang kuat. Dalam pelaporan keuangan, pimpinan SKPD tidak hanya melaporkan informasi yang hanya bersifat positif saja bagi SKPD, seperti berupa capaian yang telah diraih, akan tetapi juga berupa ketidaktercapaian. Dalam jangka panjang, penerapan transparansi pelaporan keuangan membutuhkan komitmen dari pimpinan SKPD untuk terus menyesuaikan praktiknya

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterbatasan

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak memiliki keterbatasan. Diantara keterbatasan tersebut adalah penelitian ini menerapkan metode survei yang dilaksanakan dengan pernyataan tertulis. Hal ini menimbulkan persepsi yang berbeda dari responden dengan keadaan sesungguhnya. Selain itu, objek penelitian hanya terdistribusi pada sektor pemerintahan Kota Pekanbaru sehingga mempengaruhi kemampuan penelitian ini untuk digeneralisasikan pada sektor dan wilayah yang lebih luas.

Saran

Perlu dilakukan wawancara yang mungkin dapat membantu dalam mengendalikan jawaban tiap responden. Untuk penelitian selanjutnya, perlu menambahkan variabel independen lainnya untuk melihat pengaruhnya terhadap transparansi pelaporan keuangan sehingga efektif bagi organisasi sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Hamid dan Mimin, Rukmini. 2004. *Kritik dan Otokritik LSM: Membongkar Kejujuran dan Keterbukaan Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Pustaka.
- Adha, Wendi. 2014. *Pengaruh Akuntabilitas, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Pimpinan terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan*

Keuangan (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Riau.

- Aliyah, Siti dan Aida Nahar. 2012. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara*.
- Ashworth, R., G. Boyne., dan R. Delbridge. 2009. Escape from the Iron Cage? Organizational Change and Isomorphic Pressures in the Public Sector. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan ke-2. Bandung: Alfabeta.
- Hess, D. 2007. Social Reporting and New Governance Regulation: The Prospects of Achieving Corporate Accountability Through Transparency. *Business Ethics Quarterly*.
- Kartono, Kartini. 2003. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Martono dan Agus Harjito. 2010. *Manajemen Keuangan* (Edisi 3). Yogyakarta: Ekonisia.
- Mulyana, Budi. 2006. *Pengaruh Penyajian Neaca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 Paragraf ke 7. Revisi 2009*.
- Ridha, M. Arsyadi dan Hardo Basuki. 2012. *Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin, 2012.
- Robbins SP, dan Judge. 2007. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Simbolon, Anthon. 2006. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Edisi Revisi. Penerbit: UGM Yogyakarta.
- Sukhemi. 2011. *Pengaruh Tingkat Pengungkapan Laporan*

*Keuangan terhadap
Transparansi Keuangan
Daerah di Provinsi D.I.
Yogyakarta. Akmenika UPY,
Volume 8, 2011.*

Toha, Suherman. 2007. *Penelitian
Masalah Hukum tentang
Penerapan Good Corporate
Governance Pada Dunia
Usaha.* Badan Pembinaan
Hukum Nasional Departemen
Hukum dan Hak Asasi
Manusia RI.